BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dan canggih telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Terutama teknologi informasi yang sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk instansi pemerintah maupun swasta. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan hidup manusia dari waktu ke waktu yang semakin komplek dan memicu pola pikir manusia untuk dapat menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan tuntutan zaman pada sekarang ini. Hal ini dilakukan agar segala aktivitas kehidupan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Teknologi komputer adalah salah satu contoh produk teknologi yang telah berkembang pesat yang dapat membantu mempermudah manusia dalam mengolah data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk mencapai tujuannya tiap instansi atau perusahaan memerlukan sistem yang bisa mengatur semua proses bisnis yang terjadi pada instansi atau perusahaan. Dari mulai proses mengumpulkan, mengirimkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data-data tentang kejadian atau peristiwa ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas/operasi organisasi sehari-hari., hal ini dapat dilakukan untuk mempercepat pekerjaan yang ada di dalam instansi atau perusahaan tersebut.

Pemerintah Kota Cimahi merupakan salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan aturan akuntansi pemerintahan dalam menyusun laporan keuangannya. Pemerintah Kota Cimahi telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dalam menjalankan urusan kepermerintahannya.

Perkembangan teknologi dan komputer pada lingkungan Pemkot Cimahi saat ini sudah mulai berjalan. Adapun sebuah program aplikasi/*Software* yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi tepatnya di bagian Keuangan Setda saat ini adalah Software Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sebelum *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diterapkan, ada sistem yang sudah berjalan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sistem ini masih belum terintegrasi dengan Depdagri, dengan kata lain belum terkoneksi dengan kantor pusat, sehingga kantor pusat tidak bisa mengontrol atau mengambil data keuangan yang diperlukan secara online. Oleh karena itu Depdagri menginginkan keseragaman untuk pengelolaan keuangan daerah, SIMDA pun diganti menjadi SIPKD.

Sebagai upaya update sistem, maka di implementasikan *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang merupakan *software*/program aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi proses penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban.

Kelebihan dari sistem informasi keuangan berbasis teknologi, selain pemerintah pusat dapat melakukan pengontrolan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah dan untuk waktu ke depan masyarakat pun dapat melihat sejauh mana penyerapan anggaran dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penerapan integrasi data secara elektronik sudah berlangsung sejak Januari 2010, dan dimiliki oleh semua SKPD Pemkot Cimahi. Program tersebut selaras dengan Kota Cimahi sebagai cyber city, yang bertujuan untuk penertiban adiministrasi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian permasalahn seperti surat perintah pembayaran yang tidak tepat sasaran bisa dihindari. Harapan Pemkot Cimahi dalam mengimplementasikan *Sofware* Sistem Informasi Penegelolaan Daerah (SIPKD) adalah untuk membantu proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD dan untuk mencapai laporan keuangan yang valid.

Namun kenyataan yang terjadi pada saat ini, pengimplementasian *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) masih belum berjalan dengan baik karena kondisi kinerja pegawai sendiri dimana kemampuan pegawai yang kurang optimal dalam mengoperasikan *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga sering terjadi kesalahan dalam menggunakan *Software* SIPKD.

Berikut ini adalah bagan perbandingan antara sistem-sistem sebelum dan sesudah menggunakan *Software* SIPKD secara umum :

Tabel 1.1
Perbandingan sebelum dan sesudah manggunakan SIPKD

Sistem terdahulu	Sistem saat ini SIPKD
Kelebihan : a. Lebih mudah digunakan Kekurangan : a. Belum terintegrasi dengan depdagri b. Kualitas sistem tidak secanggih *software* SIPKD c. Tidak semua skpd menggunakan sistem	Kelebihan : a. Sudah terintegrasi dengan depdagri b. Sistem lebih canggih c. Beberapa skpd menggunakan SIPKD Kekurangan : a. *Software* SIPKD sulit digunakan b. Masih terdapat kekurangan dalam mengakses sistem

Untuk pengoperasian *Software* SIPKD ini membutuhkan User komputer. User yang dipekerjakan disini adalah para pegawai Pemkot Cimahi yang bertugas untuk mengoperasikan *Software* SIPKD. Dengan beragamnya tingkat kemampuan pegawai

dalam pengoperasian komputer khususnya dalam hal pengolahan data keuangan, menuntut *software* yang dipakai mestilah *software* yang mudah digunakan dan dioperasikan. *Software* yang mudah digunakan sangat mempengaruhi tingkat efektifitas kerja pegawai dalam melakukan pengolahan data keuangan.

Berikut ini adalah bagan perbandingan efektivitas kerja sebelum dan sesudah menggunakan software SIPKD secara umum :

Table 1.2
Perbandingan efektifitas kerja sebelum dan sesudah menggunakan SIPKD

	Efektivitas kerja sebelum menggunakan SIPKD	
	a. Belum mampu membuat laporan yang telah di tetapkan. b. Pegawai belum mampu menyusun data dengan baik.	

	Efektivitas kerja sesudah menggunakan SIPKD	
	a. Tidak semua pegawai memahami SIPKD. b. Mampu mempercepat proses pengolahan keuangan c. Mampu membuat laporan yang telah ditetapkan.	

Dapat dijelaskan bahwa kemampuan yang bisa mempengaruhi efektifitas kerja tak lain adalah kemampuan dalam mengoperasikan *software* SIPKD dan mampu melakukan kegiatan pengolahan data keuangan dengan benar, demikian juga untuk meningkatkan kinerja harus ada usaha dari pegawai itu sendiri untuk melakukan dan mempelajari cara mengolah data keuangan yang baik dan benar.

Melihat uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi yang baru dapat memberikan dampak yang positif dan negatif. Maka dari itu penulis akan menganalisis Kualitas *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan akan memaparkan serta menganalisis sebagian besar manfaat yang dihasilkan dari sistem informasi yang telah diterapkan tersebut.

Penulis mencoba melakukan penelitian untuk membahas kualitas *software* yang sudah ada serta keterkaitan dengan efektifitas dan kinerja pegawai. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

"Kualitas Software Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Menciptakan Efektivitas Kerja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pemkot Cimahi".

1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah secara umum adalah segala sesuatu yang menjadi obyek permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data dan pengolahan data. Sedangkan rumusan masalah secara umum adalah segala sesuatu permasalahan yang dihadapi oleh instansi, atau perusahaan

tersebut dan dengan permasalahan tersebut harus bisa ditindak lanjuti demi tercapainya tujuan isntansi, atau perusahaan. Berikut adalah identifikasi masalah dan rumusan masalah yang terdapat di Pemkot Cimahi.

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, dapat di identifikasikan pokok permasalahan yang di hadapi oleh pegawai setelah implementasi kualitas *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diterapkan adalah masih sering terjadi salah penginputan data yang berakibat eror pada sistem, sehingga pekerjaan menjadi terganggu, dan lambatnya proses perekaman data baru.

1.2.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang berjalan saat ini di Pemkot Cimahi.
2. Bagaimana tanggapan pegawai terhadap *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
3. Bagaimana efektivitas kerja pegawai sesudah menggunakan *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
4. Bagaimana kinerja pegawai sesudah menggunakan *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
5. Seberapa besar dampak *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap efektivitas kerja pegawai Pemkot Cimahi.

6. Seberapa besar dampak *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kinerja pegawai Pemkot Cimahi.
7. Seberapa besar dampak efektivitas kerja terhadap kinerja pegawai Pemkot Cimahi.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian adalah untuk mengumpulkan data atau informasi tentang *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang nantinya akan diolah dan digunakan untuk mengetahui sebagaimana *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat di terima dan digunakan oleh pegawai sebagai sarana untuk mempermudah pegawai dalam pekerjaan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemkot Cimahi.
2. Untuk mengetahui tanggapan pegawai terhadap *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
3. Untuk mengetahui efektivitas kerja pegawai setelah menggunakan *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

4. Untuk mengetahui kinerja pegawai setelah menggunakan *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
5. Untuk menganalisis dampak *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap efektivitas kerja pegawai Pemkot Cimahi.
6. Untuk menganalisis dampak *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kinerja pegawai Pemkot Cimahi.
7. Untuk menganalisis dampak Efektivitas Kerja terhadap kinerja pegawai Pemkot Cimahi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terbagai menjadi dua jenis kegunaan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

   Hasil peneliti ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam mengimplementasikan *Software* Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi Pegawai

   Hasil peneliti ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berharga sehingga menjadi pembelajaran untuk mengoptimalkan sistem yang sudah ada.

1.4.2. Kegunaan Akademis

1. Pengembangan Ilmu

Di harapkan menjadi perbandingan antara manajemen informatika dengan keadaan yang terjadi langsung di lapangan.

2. Peneliti Lain

Bisa dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi untuk peneliti yang lebih lanjut di bidang yang sama.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan masalah yang perlu dibatasi, batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Software* SIPKD yang di bahas dalam penelitian ini hanya pada proses penganggaran saja yang terdiri dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Penelitian ini tidak membahas proses perencanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, data master dan data utility.

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian adalah tempat penulis melakukan observasi dan penelitian untuk dijadikan bahan dalam menyusun skripsi.

1.6.1. Lokasi

Lokasi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Pemkot Cimahi.

1.6.2. Waktu/Jadwal Penelitian

Penulis melakukan penelitian mulai dari bulan Maret 2011 hingga bulan Agustus 2011.

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

NO	AKTIVITAS	WAKTU																							
		MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■																							
2	Survei Perusahaan		■	■																					
3	Survei Objek Penelitian			■																					
4	Pembuatan Skripsi			■	■	■	■	■	■																
5	Pembuatan Kuesioner								■																
6	Seminar Riset									■															
7	Revisi Seminar									■	■														
8	Penyebaran Kuesioner											■													
9	Pengolahan Hasil Kuesioner												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
10	Sidang																						■		
11	Penyerahan Skripsi																								